

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan fasilitas publik di desa melibatkan penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Pelayanan publik mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintah serta layanan sosial lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aspek tersebut saling mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Pendidikan sangat penting dalam rencana pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan di desa, melalui pendidikan masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan peluang kerja serta menambah lapangan pekerjaan di desa. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan membantu masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan dari sektor pertanian dan peternakan yang sering kali rentan terhadap hasilnya. Kesehatan menjadi aspek yang dapat mendukung mutu peningkatan pembangunan di desa. Bagusnya suatu pendidikan di suatu wilayah dapat dilihat juga dari seberapa baik tingkat serta pelayanan kesehatannya. Tingkat pelayanan kesehatan yang baik serta fasilitas yang layak dapat menjamin masyarakat desa untuk tetap menjaga produktivitas mereka. Hal ini dapat berdampak pada kualitas ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jalan yang memadai dan layak dapat memudahkan masyarakat desa untuk menjalankan mobilitas sosialnya seperti, bekerja, bersekolah dan hal lainnya yang dapat membantu perkembangan pembangunan di sebuah desa. Penjelasan lebih lanjut menyatakan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam pembangunan baiknya dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk melihat bagaimana prospek nilai-nilai yang mendasari masyarakat terlibat dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup dan mengatasi macam-macam permasalahan dinamika

masyarakat (Hatu & Hatu, 2022). Manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan tujuan utama dari program pembangunan, karena dengan ini nantinya pembangunan mengalami keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Pembangunan di desa-desa harus dapat menjangkau wilayah yang kurang dengan fasilitas publik, karena problematika yang terjadi sekarang banyak wilayah-wilayah yang sulit dijangkau pembangunannya semakin terbelakang karena fasilitas jalan yang kurang memadai menyebabkan sulitnya pasokan-pasokan yang menjadi penyokong mobilitas masyarakat desa menjadi terhambat. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara warga, aparatur desa serta pemerintah pusat untuk menangani masalah tersebut.

Tercapainya satu tujuan pembangunan tidak akan terlepas dari kerjasama dan kolaborasi anantara seluruh elemen dari pemerintah sampai ke masyarakatnya. Terutama keterlibatan kaum muda yang menjadi motor dan penerus bagi keberlanjutan program pembangunan. Pemuda merupakan modal bagi bangsa dalam berbagai hal untuk menunjang berkembangnya suatu negara, berbagai harapan diletakan agar mereka menjadi individu yang diharapkan membawa negeri ini menjadi lebih maju. Peran pemuda diharapkan dapat membawa pemikiran positif dan pola pikir kritis yang bisa di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, pemuda juga mengemban ekspektasi sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat perjuangan dari generasi sebelumnya (Oktaviani, 2019). Oleh karenanya peran pemuda sangat penting dalam memonitoring serta terjun langsung bersama pemerintah desa untuk membangun fasilitas publik yang berkualitas. Salah satu bentuk dari keikutsertaan pemuda dalam pembangunan fasilitas publik bersama pemerintah desa adalah dengan adanya pembentukan organisasi kepemudaan. Contohnya seperti organisasi kepemudaan yang ada di kampung bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan anak muda. Di kampung misalnya, peran Karang Taruna adalah menjadi wadah untuk para muda-mudi di sana agar dapat menyalurkan kemampuan serta ekspresi mereka dalam berbagai hal yang dapat membantu pemerintah desa

membangun fasilitas publik untuk masyarakat di kampungnya. Menurut (Arni, 2011) mengatakan bahwa Karang Taruna ialah organisasi sebagai wadah para anggotanya yang didalamnya terdapat aktivitas dan untuk mencapai tujuan kelompok organisasi maupun tujuan umum. Peran Karang Taruna menjadi sangat penting, karena mereka adalah motor utama dan representasi pemuda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di kampung. Dengan keterlibatan aktif pemuda Karang Taruna, mereka dapat berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, sebuah pembangunan harus adanya partisipasi dari masyarakat dari mulai tahap perencanaan hingga evaluasi (Irawan & Sunandar, 2020)

Kampung Ciwantani merupakan daerah yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Cilame di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Terletak di paling ujung perbatasan Desa Cilame dengan Desa Pasir Halang dan terletak di daerah dataran tinggi, Kampung Ciwantani mempunyai potensi dalam sektor pertanian. Berbicara mengenai fasilitas publik, di Kampung Ciwantani dalam beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan. Sebelumnya pada kisaran tahun 2019-2020 Kampung Ciwantani masih belum memiliki fasilitas publik yang memadai, seperti jalanan yang masih belum di aspal, lampu penerangan jalan yang masih mengandalkan lampu depan rumah warga, belum adanya bangunan untuk posyandu. Namun di beberapa tahun terakhir ini, pemerintah serta warga Kampung Ciwantani meningkatkan pembangunan fasilitas publik dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Di Kampung Ciwantani Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, mempunyai organisasi Karang Taruna yang bernama Saptadasa. Karang Taruna Saptadasa lahir karena ada beberapa kegiatan negatif yang ada di Kampung Ciwantani. Inisiatif dari beberapa tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Ciwantani ini menandakan kepedulian mereka terhadap generasi muda agar mereka mempunyai wadah dan tempat bagi generasi muda agar menyalurkan

ide-ide mereka ke arah yang lebih positif dan menguntungkan bukan hanya bagi individu Karang Taruna Saptadasa saja namun bagi masyarakat Kampung Ciwantani. Rasa tanggung jawab yang besar harus dimiliki setiap anggota Karang Taruna terhadap lingkungan dan atas dirinya sendiri juga masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan hidup mereka (Widiastuti, 2018). Karang Taruna Saptadasa beranggotakan para pemuda dan pemudi di Kampung Ciwantani yang memiliki tujuan bersama yaitu untuk membuat kampungnya menjadi lebih baik dan maju salah satunya dalam segi fasilitas publik di daerahnya. Karena mereka mempunyai kesadaran yang menginginkan daerahnya menjadi lebih maju, oleh karena itu pemerintah kampung setempat menyediakan serta ikut andil juga dalam pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani. Pembangunan partisipatif akan membuat masyarakat merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangunan (Sutrisna, 2022). Diangkatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Karang Taruna dan warga Kampung Ciwantani Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ikut berpartisipasi bersama pemerintah kampung dalam membangun fasilitas publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat Karang Taruna dan warga untuk berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun fasilitas publik yang ada di Kampung Ciwantani. Juga menganalisis manfaat apa saja yang telah diterima masyarakat Kampung Ciwantani setelah menaikkan mutu fasilitas publik yang ada di kampung mereka.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dilihat dari latar belakang permasalahan yang sudah disusun, maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana peran Karang Taruna dan warga dalam meningkatkan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dan pendorong Karang Taruna dan warga dalam meningkatkan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani?
3. Apa saja manfaat yang diterima masyarakat Kampung Ciwantani setelah adanya peningkatan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait apa saja yang menjadi tujuan dibuatnya penelitian ini, adapun tujuan penelitiannya ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Karang Taruna dan warga dalam meningkatkan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani.
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan dan pendorong Karang Taruna dan warga dalam meningkatkan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani.
3. Untuk mengetahui manfaat apa saja yang diterima masyarakat Kampung Ciwantani setelah adanya peningkatan pembangunan fasilitas publik di Kampung Ciwantani.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun kegunaannya dilihat dari segi akademis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumber solusi untuk masalah yang akan datang, khususnya yang berkenaan terkait peran Karang Taruna dan warga

dalam meningkatkan pembangunan fasilitas publik. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan terutama di bidang sosial khususnya dalam bidang konsentrasi ilmu sosiologi pembangunan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya di wilayah Kampung Ciwantani, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendorong peningkatan pembangunan fasilitas publik dengan melibatkan peran aktif dari warga setempat serta Karang Taruna Saptadasa sebagai penggerak aspirasi dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan Karang Taruna dalam perencanaan dan pelaksanaan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Bagi Karang Taruna Saptadasa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas publik di Kampung Ciwantani. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan menawarkan rekomendasi strategis yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut.

### **E. Kerangka Berpikir**

Peran ialah suatu aspek di dalam masyarakat atau organisasi yang merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Adapun pengertian peran menurut Robert K Merton yang di ungkapkannya dalam teori peran yang di kutip dalam buku sosiologi modern (Raho, 2021) peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan individu ketika individu lainnya menduduki status tertentu. Sedangkan status adalah aspek dinamis dari sebuah peran atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Suatu peran akan terbentuk dimana individu tersebut tinggal. Peran ada karena sebuah sistem yang membutuhkan individu tersebut untuk melakukan hal yang di harapkan orang lain. Sebuah peran akan semakin mempunyai arti jika peran

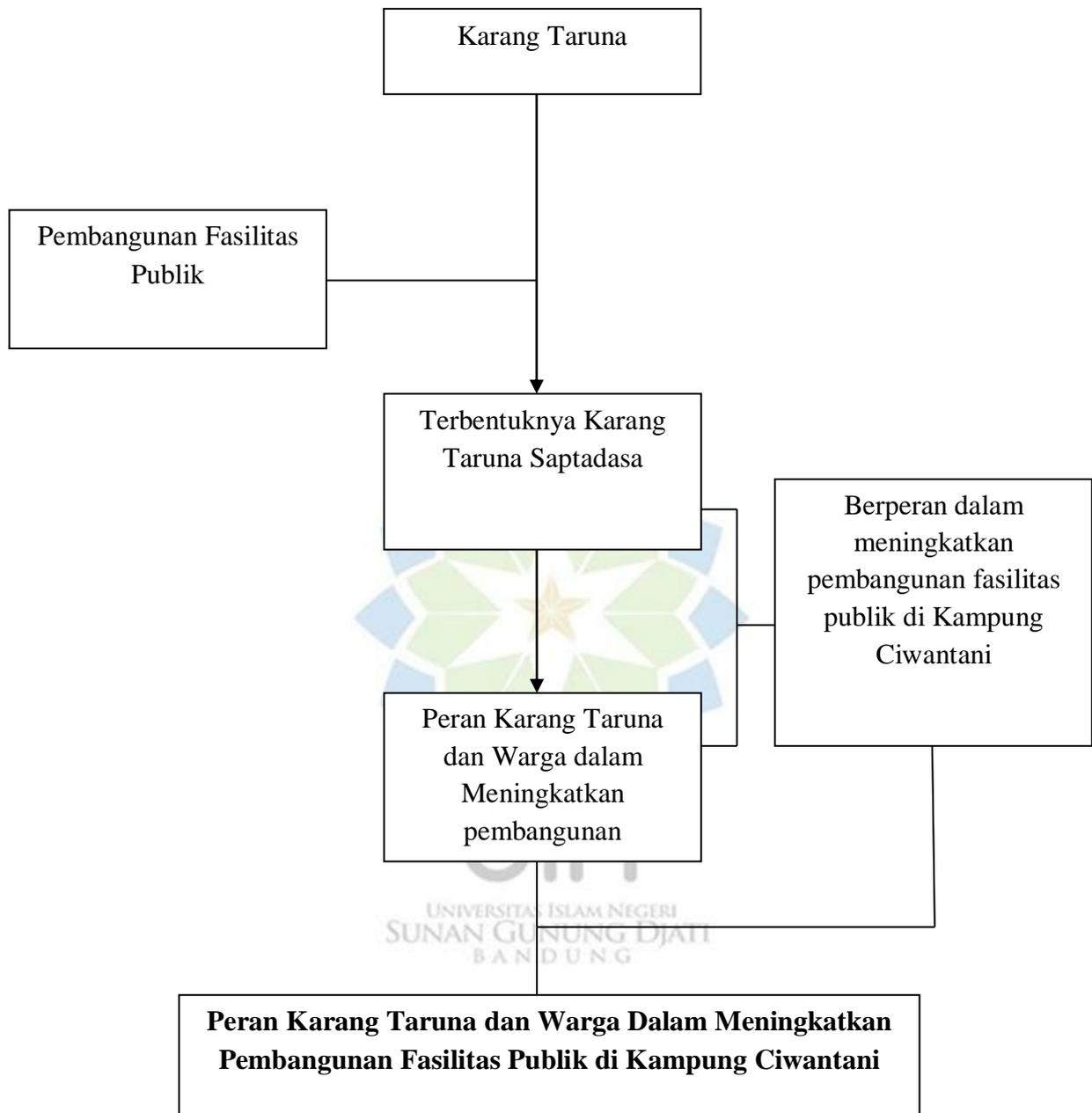
tersebut memiliki makna dalam suatu sistem seperti orang, organisasi dan politik.

Pembangunan pada hakekatnya ialah proses perubahan di suatu wilayah yang melibatkan unsur masyarakat dari satu keadaan yang mendekati keadaan masyarakat yang dicita-citakan (Hatu & Hatu, 2022). Dengan adanya pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan disemua aspek. Pembangunan juga dilakukan agar dapat mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai “Suatu perjalanan evolusi di mana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, fokus pembangunan, teknologi, dan perubahan institusi saling berhubungan secara harmonis dan bertujuan meningkatkan potensi sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikatan oleh Emil Salim, Mantan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, (Salim, 1983) Proses pembangunan harus diikuti oleh pembangunan ekonomi dalam perubahan struktur ekonomi dari pertanian menjadi industri atau penyedia barang dan jasa, perubahan kelembagaan dan melalui orde lama, orde baru dan sampai reformasi. (Subandi, 2011) mengatakan bahwa pembangunan terencana lebih disarankan karena hasilnya yang masih dapat di pantau dan teratur bagi masyarakat yang sudah maju atau sedang berkembang.

Fasilitas publik adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai maksud dan tujuan. Fasilitas umum di kampung adalah sarana yang disediakan pemerintah untuk kepentingan umum masyarakat di kampung, misalnya seperti jalan yang bagus, sekolah-sekolah (sekolah dasar sampai sekolah menengah atas), lampu penerangan jalan, air bersih yang mengalir ke setiap rumah warga, sanitasi (saluran air, tempat sampah), tempat ibadah, warung penyedia kebutuhan pokok warga sehari-hari, dan klinik kesehatan. Dalam penyediaanya, harus memperhatikan kebutuhan bagi masyarakat kelompok rentan atau berkebutuhan layaknya anak-anak, ibu hamil, lansia,

dan juga penyandang cacat, karena mereka juga bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dalam menerima fasilitas publik (Rahmadana, 2020)

Dalam sebuah proses pembangunan, peran masyarakat sekitar dalam berpartisipasi akan mempermudah jalannya proses pembangunan di suatu wilayah. Ditambah adanya peran organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan warga sekitar akan membantu sekali mobilitas di wilayah yang sedang menjalankan pembangunan. Pembentukan Karang Taruna telah ada dalam Permensos Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Peran yang semakin meningkat dari Karang Taruna telah terlihat sejak awal tahun 1960-an, mulai dari kegiatan kreatif dan inovatif hingga mencapai tahap kegiatan produktif, termasuk di dalamnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Karang Taruna ialah penyalur partisipasi masyarakat sebagai tempat pemberdayaan usia muda di kampung atau desa dalam bidang kesejahteraan sosial. Seperti yang di ungkapkan oleh (Irawan A. , 2019) bahwa urgensi dari partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam satu program pembangunan dinilai sangat penting, karena masyarakat memegang komponen peranan yang vital dalam pelaksanaan pembangunan di kampung, sebab dengan partisipasi ini akan berdampak pada kebermanfaatan hasil dari pembangunan tersebut. Karang Taruna yang umunya beranggotakan pemuda ini mempunyai pandangan dan pemikiran yang kritis, hal ini dapat membantu pemerintahan setempat mengevaluasi bila ada pembangunan atau kebijakan yang menentang kesejahteraan masyarakat. Karena Pada hakikatnya pembangunan fasilitas publik harus sejalan dengan kepentingan masyarakat desa atau kampung tersebut, jangan sampai pembangunan ini hanya berpihak pada golongan atau kelompok tertentu.



**Gambar 1**  
**Skema Konseptual**